



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	1&7
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



BERPRESTASI: Wali Kota Fadly Amran dan Wawako Asrul.

Kelima Kalinya Berturut, Padangpanjang Raih WTP

Padangpanjang, Padek—Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk kelima kalinya berturut-turut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berpendapat tidak terdapat salah saji yang bersifat material dan

» Baca Kelima...Hal 7

Kelima Kalinya Berturut, Padangpanjang...

Sambungan dari hal. 1

telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

BPKRI memiliki keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemko Padangpanjang tahun 2020 memperoleh opini WTP. Opini tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pe-

merintah tahun 2021 bertema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama hadapi Pandemi" secara virtual, kemarin (14/9).

Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran BBA Dt Paduko Malano menyampaikan agenda penyerahan LHP atas Laporan Keuangan momentum yang memberikan arti penting sebagai wujud nyata dan komitmen bersama guna menciptakan pemerintahan yang

bersih, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.

"*Alhamdulillah* berkat kerja keras semua jajaran Pemko dan masukan perbaikan dari BPKRI laporan keuangan tersebut mendapat opini "WTP" kelima kalinya," tutur Wako Fadly melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Wako Fadly menilai, opini WTP ini memberikan semangat bagi seluruh jajaran Pemko

Padangpanjang untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara dalam mendukung peningkatan mutu dan akses pelayanan terhadap publik.

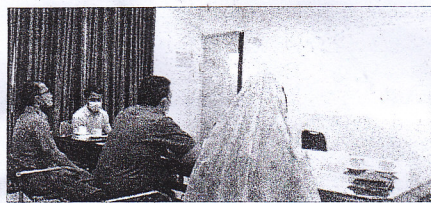
Selain itu, opini WTP juga menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara profesional, bijaksana, transparan, dan akuntabel. Laporan keuangan menurutnya tidak hanya sekadar laporan yang

tersimpan rapi, tetapi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

"Pemko Padangpanjang terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan kualitas pemanfaatannya dan terus mendorong untuk lebih efektif dan lebih akuntabel," tegas Fadly.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padangpanjang, Winarno atas capaian opini WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020. Hal ini diungkapkannya meski di tengah keharusan *refocusing* anggaran akibat terpaan pandemi Covid-19, pelaporan atas pengelolaan keuangan dapat memenuhi standar akuntansi negara.

Dibeberkan Winarno, Pemko Padangpanjang dalam pengelolaan keuangan daerah berpuan pendapatan pada 2020 mampu mencapai 100,26 persen atau



PENGHARGAAN: Sekko Sonny Budaya Putra dan Kepala BPKAD Padangpanjang saat mengikuti pemberian penghargaan opini WTP secara virtual di ruang Rapat VIP Balai Kota setempat.

sebesar Rp 547.774.902.696,06 dari target Rp 546.345.635.456,66. Demikian juga dari sisi belanja Rp 593.388.193.076,43 dapat terrealisasi sebesar Rp 544.006.534.759,84 atau mencapai 91,68 persen.

"Capaian ini tidak terlepas dari upaya dan komitmen seluruh komponen organisasi perangkat di lingkungan Pemko Padangpanjang. Sejumlah rekomendasi dan masukan BPKRI yang diterima atas laporan keuangan 2020, tentu ini akan terus menjadikan pelap-

oran pengelolaan keuangan kedepannya makin berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah," jawab Winarno via *handphone*-nya.

Disampaikannya juga, opini atas kewajaran laporan keuangan memperhatikan empat kriteria. Masing-masing Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (wrd)